

## PENGGALIAN POTENSI USAHA BUMK HENDRO MULYO, LAMPUNG TENGAH

Puji Kurnianingsih,  
Andika Fadila Syuja,  
Fahrizal Adi,  
Nabilla Ulfah Prihandini,  
Reza Kurniawan,  
Saraswati Permita Sari,  
Taufik Raharjo,  
Agus Sunarya Sulaeman

Politeknik Keuangan Negara STAN

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

\*Corresponding author

Pilih penulis yang akan menjadi  
korespondensi author

Email : corresponding author

### Abstraksi

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hendro Mulyo didirikan oleh Pemerintah Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Meskipun letaknya strategis namun BUMK ini belum dapat menggali potensi usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggali potensi desa sebagai bentuk usaha BUMK dan membuat Rencana Anggaran Biaya untuk usaha BUMK. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengelolaan BUMK telah menetapkan bentuk usaha dan mampu Rencana Anggaran Biaya usaha mereka.

Anggaran Biaya, Pengabdian Kepada Masyarakat *Kata Kunci:* Badan Usaha Milik Desa, Desa, Pendampingan, Rencana

### Abstract – dalam bahasa inggris

The Village Owned Enterprises (BUMK) Hendro Mulyo was established by the Government of Tempuran Village, Trimurjo District, Central Lampung Regency. Although it is strategically located, BUMK has not been able to explore business potential following the conditions of the local community. The purpose of this community service activity is to explore the potential of the village as a form of BUMK business and make a Budget Plan for BUMK businesses. The result of community service activities is that BUMK management has established a business form and can plan their business budget.

*Keywords:* Village-Owned Enterprises, Villages, Assistance, Budget Plan, Community Service

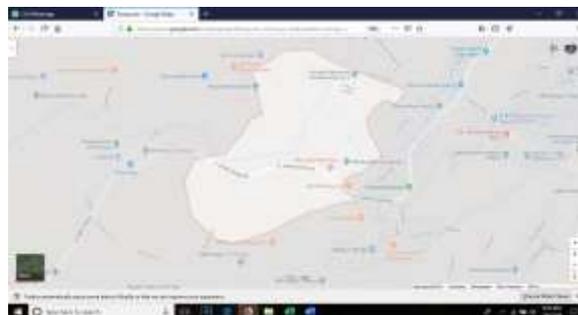
© 2019 Unit Penerbitan PKN STAN. All rights reserved

### PENDAHULUAN

Desa Tempuran atau yang lebih dikenal dengan Kampung Tempuran merupakan salah satu dari 14 kampung yang berada di bawah wilayah Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung ini terletak tidak jauh dari wilayah Kota Metro yang dahulu merupakan ibukota dari Kab. Lampung Tengah sebelum menjadi kota tersendiri. Menilik dari segi sejarah, Kampung Tempuran didirikan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1936 yang mana seluruh penduduknya berasal dari Pulau Jawa dengan total sebanyak 445 kepala keluarga dan terbagi kedalam tiga bedeng (wilayah bagian) yaitu Bedeng 12A, Bedeng 12B dan Bedeng 13C.

Pada awal pendirian, kampung ini bernama Hendro Mulyo, kemudian berubah menjadi Kampung Tempuran disebabkan pada tanggal 2

Februari 1949, wilayah perkampungan ini menjadi ajang pertempuran melawan para penjajah. Sehingga pada tahun 1951 Hendro Mulyo berganti nama menjadi Kampung Tempuran.



Gambar 1. Peta Kampung Tempuran

Meskipun berbatasan dengan Kota Metro yang notabene merupakan salah satu kota besar di Provinsi Lampung, wilayah Kampung Tempuran

sendiri masih didominasi oleh areal persawahan sehingga sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Akan tetapi secara geografis letak Kampung Tempuran cukup strategis karena lokasinya dibelah oleh jalan raya yang menghubungkan Kota Metro dengan jalan lintas tengah Sumatera serta jalan Tol Trans Sumatera yang diharapkan dapat mempermudah distribusi hasil pertanian.

Secara demografi, kampung ini mempunyai jumlah penduduk mencapai 5351 orang yang terbagi kedalam 1476 kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2778 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2578 orang, sehingga secara kuantitas, potensi sumber daya manusia di kampung ini termasuk bagus, karena sebagian besar penduduknya berusia produktif.

Sebagai sebuah institusi desa, Pemerintahan Kampung Tempuran tentunya memiliki program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk kontribusi desa untuk peningkatan kesejahteraan seperti yang diharapkan yaitu berupa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) layaknya program desa pada umumnya.

Program BUMDesa merupakan salah satu program prioritas utama negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Karena menjadi prioritas utama negara, maka pemerintah pusat telah melakukan intervensi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membentuk BUM Desa di setiap Desa di seluruh wilayah Indonesia. BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa/Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015).

BUMDesa yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Tempuran diberi nama BUMK Hendro Mulyo. Sebutan BUMK ini karena nama desa disebut dengan nama Kampung, maka terdapat sedikit penyesuaian, nama BUMDesa disesuaikan dengan nama Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Pendirian BUMK ini diharapkan mampu memberikan profit tersendiri bagi BUMK serta yang paling utama mampu memberikan *social benefits* bagi masyarakatnya. Pemerintah Kampung Tempuran sendiri pada tahun 2018

sudah mendirikan dan mengalokasikan dana untuk penyertaan modal kepada BUMK sebesar Rp10.000.000,00 sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah desa agar BUMK ini dapat berjalan dengan baik.

### Permasalahan

Meski sejak tahun 2018 berdiri, namun hingga bulan Juli 2019, BUMK Hendro Mulyo ternyata belum usaha yang dijalankan. Hal tersebut dikarenakan pihak desa terutama ketua BUMK belum menemukan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Tempuran. Dengan belum berjalannya kegiatan usaha BUMK, itu artinya masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari BUMK seperti yang diharapkan. Sehingga perlu adanya penggalian potensi usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat, namun tak lepas dari kemampuan pengelola BUMK. Tak hanya penggalian potensi saja, namun pengabdian juga akan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis BUMK tersebut.

Melihat permasalahan yang dialami BUMK Hendro Mulyo, maka tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain :

- a. Menggali potensi desa sebagai bentuk usaha BUMK;
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya untuk usaha BUMK.

### TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran dapat didefinisikan rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis (Rudianto, 2009:3). Menurut Nafarin (2000:10) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan, serta merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan yang untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya menurut Bastian (2006:164), anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Sedangkan pengertian biaya (*expense*) menurut Supriyono (2011: 12) adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (*revenue*) yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Definisi menurut Mulyadi (2003:4), biaya adalah kas sumber daya yang telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Blocher, David dan Cokins (2011:8), Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang

dikorbankan (*sacrificed*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi anggaran dan biaya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah segala bentuk perencanaan mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan untuk mencapai profit yang dinyatakan dalam satuan uang. RAB meliputi anggaran biaya produksi, pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya sehingga harus disusun secermat dan seteliti mungkin.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

### 1. Identifikasi masalah dan rencana aksi

Tahap ini mencoba mencari masalah dalam penentuan usaha BUMK Hendro Mulyo dan kemudian membuat rencana aksi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan agar kegiatan pengabdian ini tepat manfaat.

### 2. Persiapan

Setelah mendapatkan rencana aksi maka dilakukan persiapan kegiatan pengabdian masyarakat.

### 3. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti rencana kegiatan dan mencoba menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.

## PEMBAHASAN

### Identifikasi Masalah dan rencana solusi

Identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam kegiatan ini. Metode yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah adalah dengan mewawancarai sekretaris desa dan pengelola BUMK.

Secara demografi, sebagian besar masyarakat di Kampung Tempuran adalah petani. Kegiatan pertanian pertanian pun telah dilakukan secara modern dan dikelola bersama dibawah binaan kelompok tani setempat. Sempat direncanakan dana sebesar Rp10.000.000,00 tersebut akan digunakan untuk menjalankan usaha di bidang peternakan dalam hal ini berupa peternakan kambing. Namun dengan permodalan yang kecil, maka gambaran usaha tersebut adalah usaha tradisional sehingga muncul kekhawatiran akan risiko tinggi mengingat perawatan kambing juga cukup sulit dan padat modal. Dana tersebut akhirnya hanya digunakan sebagai investasi modal kepada pihak lain.

Di akhir wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa saat ini BUMK belum menjalankan kegiatan usaha. Namun menurut Bapak Adhe Hartoyo selaku ketua BUMK saat ini telah dipersiapkan usaha layanan jasa keuangan agen "BRILink". Usaha jasa ini dirasa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan pengelola dirasa juga mampu menjalankan usaha tersebut, kare sudah ada pengalaman sebelumnya mengenai usaha yang sejenis.

Melihat proses persiapan usaha layanan jasa keuangan agen "BRILink" sudah sampai dengan menunggu hasil pendaftaran di BRI, maka usaha ini menjadi satu-satunya alternatif usaha yang akan dijalankan oleh BUMK Hendro Mulyo.

Hanya saja pengelola ternyata belum membuat RAB yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Meskipun sudah ada proposal terkait usaha yang akan dilaksanakan, namun hanya berupa perkiraan penerimaan dan persentase pembagian hasil saja tanpa adanya penghitungan yang lebih terperinci. Melihat masalah tersebut maka, perlu adanya penyusunan RAB untuk merencanakan aktivitas-aktivitas BUMK guna mencapai profit yang diharapkan.



Gambar 2. Wawancara Identifikasi Masalah

Kegiatan pengabdian pelatihan pembuatan RAB untuk BUMDesa sendiri telah dilakukan oleh Raharjo (2019) dengan pelaksanaan menggunakan metode klasikal untuk para pengelola BUMDesa di wilayah Kabupaten Tangerang. Sehingga dapat dikatakan, kegiatan pengabdian pembuatan RAB di BUMK Hendro Mulyo ini dilaksanakan lebih intensif, dengan harapan mampu mendapatkan output yang lebih efektif.

### Persiapan

Kegiatan penyusunan RAB dimulai dengan wawancara dengan narasumber yaitu Ketua BUMK, Bapak Adhe Hartoyo. Wawancara ini dilakukan sebagai sarana penggalan informasi yang lebih mendalam perihal anggaran yang nantinya akan dikeluarkan demi pelaksanaan BUMK yang lebih terarah. Setelah sesi wawancara dilaksanakan, tim mulai berdiskusi untuk menentukan rincian biaya yang ada sampai BUMK mendapatkan profit. Dasar penghitungannya tentu saja berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh BUMK itu sendiri.

Hasil dari wawancara itu sendiri adalah tim mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan BUMK serta dari kegiatan tersebut, ditemukan bahwa beberapa bagian yang seharusnya menjadi "beban" atau biaya, tidak diperhitungkan. Singkatnya, biaya yang timbul ini dibebankan sebagai pengurang pada sisa modal yang dimiliki BUMK.

### Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan penyusunan RAB dilaksanakan di kediaman Bapak Adhe Hartoyo, tentunya setelah wawancara dilakukan. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk usaha yang utama yaitu *BRI-link*. Rincian biayanya meliputi biaya *charge* ke BRI itu sendiri, sedangkan biaya lainnya berupa biaya operator yang pada awal pelaksanaannya masih akan dijalankan oleh Bapak Adhe sendiri, sehingga tidak ada biaya yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan usaha BUMK masih perlu diperhatikan hal-hal yang sebelumnya diabaikan seperti biaya-biaya tak terduga yang mungkin timbul atau bahkan memang ada biaya yang terjadi namun tidak diperhitungkan karena tidak signifikan dan bahkan biaya tersebut digunakan sebagai pengurang modal BUMK. Jika hal ini terus dilakukan, perhitungan profit menjadi tidak tepat karena pembebanan biaya yang salah.



Gambar 3. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya

Dengan proporsi pembagian keuntungan yang telah ditentukan oleh AD/ART sebelumnya. Ketika kegiatan BUMK ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka operator *BRI-link* akan diserahkan kepada orang lain (ada karyawan) dengan proporsi pembagian profit 60:40 dengan BUMK. Proporsi yang menguntungkan bagi operator. Pembagian ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan BUMK yang masih dalam proses merintis ini. Namun tim menyarankan agar dalam seiring berjalannya waktu, proporsi ini dapat diubah agar profit yang nantinya dihasilkan dapat dirasakan oleh BUMK itu sendiri juga masyarakat di Kampung Tempuran ini.



Gambar 4. Pembukaan Layanan Jasa Keuangan "BRILink"

### KESIMPULAN

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa 1) pengelolaan BUMK telah menetapkan bentuk usaha BUMK berupa usaha layanan jasa keuangan agen "BRILink". 2) Pengelola telah mampu membuat RAB usaha mereka dengan memperhatikan biaya-biaya tak terduga yang mungkin timbul namun sering kali tidak diperhitungkan karena tidak signifikan mengurangi modal.

### TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yang telah bersedia berkerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Semoga pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat tetap terlaksana secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya para pengelola BUMK di Provinsi Lampung.

### PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Blocher, Edward J., David E Stout, dan Gary Cokins, 2011, *Manajemen Biaya dengan Penekanan Strategis*. Buku Satu. Diterjemahkan oleh David Wijaya. Jakarta: Salemba Empat
- M. Nafarin, 2000, *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Mulyadi, 2003, *Sistem Akuntansi*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Raharjo, T., & Sulaeman, A. S., 2019, *Pembuatan Rencana Anggaran Biaya Bagi Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tangerang*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.
- Rudianto, 2009, *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo
- Samryn. L. M, 2011, *Akuntansi Manajerial: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahrial, Dermawan dan Djahotman Purba, 2011, *Analisis Laporan Keuangan Cara Mudah & Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriyono. R, 2011, *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan pengndalian biaya, serta pengambilan keputusan*. Yogyakarta :BPFE